

# Kementan Rekomendasikan Impor 1,1 Juta Ton Bawang Putih

JAKARTA (KR) - Kementerian Pertanian melalui Ditjen Hortikultura telah menerbitkan total 200 lebih Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putih dengan total volume mencapai 1,1 juta ton.

"Jadi bukan hanya beberapa importir saja. Saya sampaikan bahwa wewenang perizinan impor bawang putih ada di Kementerian Perdagangan. Setelah RIPH diterbitkan oleh Kementan, pelaku usaha melakukan pengajuan Persetujuan Impor (PI) ke Kemendag," kata Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto di Jakarta, Minggu (15/10).

Prihasto menjelaskan, pelaku usaha mengajukan RIPH bawang putih secara online melalui SINAS NK terintegrasi dengan Sistem RIPH atau kini bernama SINAS NK sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2019. Apabila pengajuan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis akan diterbitkan RIPH.

"Pelaku usaha mengajukan RIPH bawang putih secara online melalui SINAS NK terintegrasi dengan Sistem RIPH, dimana mulai 2023 masuk dalam NK Transisi. Apabila pengajuan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis akan

diterbitkan RIPH," jelasnya.

Prihasto menegaskan, RIPH adalah rekomendasi teknis yang menyatakan bahwa produk hortikultura yang akan diimpor telah memenuhi persyaratan produk yang aman konsumsi, bermutu baik. Kemudian menerapkan prinsip telusur balik yang baik (traceability) dan memenuhi standar keamanan pangan segar asal tumbuhan. "RIPH diperlukan pelaku usaha sebagai salah satu syarat melakukan impor produk hortikultura," tegasnya.

Adapun untuk pengajuan RIPH tahun 2024 nanti, pelaku usaha boleh mengajukan RIPH bawang putih sesuai kepatuhannya dalam menjalankan wajib tanam dan produksi bawang putih sebagaimana telah diatur dalam Permentan 39/2019. Apabila sebuah perusahaan telah melaksanakan kewajibannya, akan diterbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) dari Kementan cq Ditjen Hortikultura.

Sebagai contoh, untuk perusahaan yang sudah melaksanakan wajib tanam dan produksi bawang putih dengan terbit 1 SKL dan tidak ada penyelesaian kewajiban tanam lainnya, maka dapat mengajukan permohonan RIPH 2024 sampai dengan 4.000 ton. Untuk 2 SKL se-

banyak 5.000 ton, demikian seterusnya untuk yang 3, 4, dan 5 SKL.

Sampai saat ini sudah ada 100 perusahaan lebih yang telah melaksanakan wajib tanam dan produksi bawang putih sesuai aturan yang ada. Kementan juga telah menyiapkan berbagai instrumen monitoring untuk kepatuhan yang bekerja sama dengan Satgas Pangan.

Sebelumnya, Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi menegaskan, Kementan saat ini tengah menamakan semangat antikorupsi dan menegakkan integritas di jajarannya. Salah satunya dengan mempersiapkan Program Quick Wins dalam waktu 3 bulan ke depan, di antaranya yakni langkah inisiatif yang sangat cepat untuk mereformasi birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), antara lain melalui penerbitan RIPH yang transparan sesuai aturan main bagi semua importir bawang putih.

"Saya yakin dan percaya Kementerian Pertanian setelah ini adalah Kementerian Pertanian yang bermartabat, Kementerian Pertanian yang bisa dibanggakan dan Kementerian Pertanian yang bisa menjadi contoh bagi kementerian lainnya," jelasnya. (Ant/San)-f

# SASTRA BULAN PURNAMA SUDAH 12 TAHUN Tak Ada Senioritas dalam Kepenyairan



Para perempuan membaca puisi pada Sastra Bulan Purnama edisi 145.

YOGYA (KR) - Tak terhitung berapa jumlah puisi yang pernah "terlibat" pada selama 12 tahun Sastra Bulan Purnama (SBP) digelar. "Yang jelas sudah ribuan puisi," kata Ons Untoro, pemrakarsa gelaran SBP, saat dihubungi di Yogyakarta, Minggu (15/10/2023).

SBP yang digelar setiap bulan dan khusus menampilkan puisi-puisi baru. Menurut Ons, di antara karya-karya penyair dari berbagai kota tersebut diterbitkan oleh SBP dan tercatat sudah 73 buku sejak 2016. Di samping itu, lebih 200 puisi dari beberapa antologi yang diterbitkan pihak lain diluncurkan di SBP.

"Biasanya, yang tampil di SBP minimal lima penyair setiap bulan. Jadi kira-kira lebih dari 300 penyair kalau diasumsikan ada penyair yang sama tampil pada bulan dan tahun berbeda. Mereka datang lebih dari 20 kota di Indonesia," tuturnya.

Domikasi penyair yang telah puluhan tahun menulis puisi pada setiap penyelenggaraan SBP, kata Ons, kemungkinan mereka memiliki stok karya karena konsisten menulis. Sehingga setiap diminta, bisa segera mengirimkannya. Sementara penyair muda perlu diberi banyak waktu untuk menulis puisi, padahal sering penyelenggaraan direncanakan dalam waktu pendek, mereka belum siap.

Meski demikian, kepenyairan tidak perlu dilihat dari sisi senioritas, melainkan dari konsistensi pada proses. Tidak sedikit penyair yang dulu aktif di Persada Studi Klub (PSK) di bawah didikan Umbu Landu Paranggi (alm), sekarang tidak lagi menulis. Sebaliknya, ada anak-anak

muda yang menulis saat ada lomba dan kepentingan event lainnya.

"Menulis puisi adalah satu proses, karena itu puisi yang sudah dianggap selesai ditulis, masih bisa diperbaiki lagi," katanya.

Saat ini, usia SBP sudah mencapai 12 tahun. Untuk merayakannya, digelar Bincang-bincang dan Baca Puisi 12 Tahun Sastra Bulan Purnama di Balai Bahasa Yogyakarta dan Museum Sandi Negara, Sabtu (14/10/2023). Dua buku diluncurkan, yakni kumpulan esai 'Oase di (Tepian) Kota' dan kumpulan puisi 'Silaturahmi Sehat'.

Perayaan 12 tahun ini merupakan edisi ke-145 SBP yang awalnya digelar di Tembi Rumah Budaya, Bantul. Setelah sekitar 10 tahun, kegiatan bulanan tersebut juga dilakukan di Akademi Komunitas Seni dan Budaya, Museum Sandi, Balai Bahasa Yogyakarta, dan November mendatang di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD).

Antologi 'Silaturahmi Sehat' berisi karya 99 penyair berbagai usia dari berbagai kota, termasuk yang sudah memiliki nama beken seperti Adri Darmadji Woko, Afnan Malay, Noorca Marendra Massardi, Yudhistira ANM Massardi, Gunoto Saparie, Fauzi Absal, Mardjudin Suaeb, Suminto A Sayuti, Sutirman Eka Ardhana, Genthong Hariono, Hamdy Salad, Daladi Ahmad, Krishna Miharja, hingga yang berusia muda. Sebagian dari mereka juga datang pada SBP kemarin, termasuk dari Jakarta, Garut, Madura, Mojokerto, Semarang, Temanggung, Magelang, dan kota-kota lain. (Ewp)-f

# DISPERINDAG DIY ANGGARKAN RP 1 M Tekan Harga Beras, OP Digiatkan

YOGYA (KR) - Untuk menekan kenaikan harga beras sebelum momen libur panjang Natal dan tahun baru, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY berencana menggiatkan Operasi Pasar (OP) di sejumlah pasar tradisional di DIY.

Selain OP dan pasar murah, Perum Bulog Kanwil Yogyakarta juga telah menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam bentuk Bantuan Pangan Beras 10 kg untuk setiap Penerima Bantuan Pangan (PBP).

"Dari koordinasi kami, dipastikan persediaan beras Bulog masih aman sampai panen berikutnya. Apalagi nanti akan ada tambahan impor dari Pemerintah Pusat. Kami sudah menyiapkan logistik Rp 1 miliar yang

diharapkan dapat menurunkan (harga beras) di akhir bulan Oktober. Dengan begitu Operasi Pasar dan pasar murah bisa lebih digiatkan," kata Kepala Disperindag DIY Syam Arjayanti di Yogyakarta, Minggu (15/10).

Menurutnya, berdasarkan data dan pantauan Disperindag DIY di beberapa pasar tradisional di Kota Yogyakarta seperti Pasar Demangan, Pasar Beringharjo, Pasar Kranggan, dan Pasar Prawirotaman, harga beras medium rata-rata dipatok Rp 13.000/kg. Sementara beras premium berkisar Rp 14.000-Rp 16.000/kg. Harga beras tersebut masih melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan. Adapun OP akan dilaksanakan di empat pasar pantauan di Kota

Yogyakarta dengan target penyaluran 259 ton bahan pangan melalui Kios Segara Amarta. Kios itu didirikan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta menjadi rujukan harga-harga kebutuhan pokok di pasar.

"Harapan kami dengan adanya Operasi Pasar bisa menahan harga beras agar tidak naik lagi. Karena dalam situasi sekarang untuk menambah stok, Bulog juga tidak mudah, karena belum pada panen dan banyak yang menanam palawija," ungkapnya.

Ditambahkan, kenaikan harga beras sekarang disebabkan belum memasuki masa panen. Selain itu saat musim kemarau banyak petani beralih menanam palawija yang relatif membutuhkan sedikit air. (Ria)-f

# MK Sambungan hal 1

Walikota Bukittinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangga mengajukan petitum yang sama dengan Partai Garuda.

Pembacaan putusan ini dilakukan hanya empat hari sebelum pendaftaran capres-cawapres yang dijadwalkan KPU pada Kamis (19/10) hingga Rabu (25/10). Sejauh ini, karena UU Pemilu belum berubah, lembaga penyelenggara pemilu itu, masih berpedoman pada ketentuan yang ada di UU Pemilu, yang menyebutkan, batas minimum usia capres-cawapres adalah 40 tahun. Namun, KPU siap mematuhi putusan MK sebagai produk hukum yang final dan mengikat.

Ahli Hukum Tata Negara dan Konstitusi dari Universitas Muslim Indonesia Makassar Fahri Bachman menyebut, beberapa kemungkinan putusan MK terkait gugatan usia minimum capres-cawapres. Ia menjelaskan, amar putusan untuk pengujian materiil, dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan syarat formil, pengajuan permohonan antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 10, Pasal 11 dan/atau Pasal 12, amar putusan, "menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima".

Kemungkinan berikutnya, dalam hal

pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, maka MK dalam amar putusan menyatakan, "Menolak permohonan pemohon". Selanjutnya, katanya, dalam hal pokok permohonan beralasan menurut hukum, maka MK dalam amar putusan menyatakan Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian/seluruhnya.

Varian putusan selanjutnya, menurut Fahri, adalah dalam hal Mahkamah berpendapat, bahwa permohonan pengujian materiil inkonstitusional bersyarat, maka amar putusan adalah mengabulkan permohonan pemohon. Kemudian, yang terakhir, dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menambahkan amar selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

"Jika kita mencermati perkembangan persidangan MK dalam mengadili perkara 'a quo' selama ini, sangat potensial akan terjadi dua kemungkinan," ungkapnya.

Kemungkinan pertama, MK dalam putusannya akan menurunkan batas usia dari capres/cawapres dari batas usia 40 menjadi 35 tahun. Kemungkinan kedua, tetap mempertahankan usia 40 tahun namun ditambahkan dengan suatu syarat khusus yaitu pernah menjabat atau menjadi kepala daerah dengan segala konsekuensi konsti-

tusionalnya, tentunya dengan melihat 'experience' pengalaman" putusan-putusan MK sebelumnya.

Ia menjelaskan hal itu, termasuk MK pernah mengabulkan seluruh permohonan pengujian UU No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Pemohonan diajukan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufon dalam No 112/PUU-XX/2022, amar putusan tersebut, MK menyatakan Pasal 29 huruf e UU KPK yang semula berbunyi, "Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan", bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan".

Bapat saja, jelasnya, MK membuat putusan dengan corak dan karakter yang demikian itu, sehingga batas usia 40 tahun eksistensi normanya tetap berlaku, tetapi ditambah keadaan hukum khusus agar dapat menjangkau subjek hukum tertentu. (Ant/Obi)-f

# Sikap Sambungan hal 1

Presiden Joko Widodo untuk melakukan koordinasi maupun audiensi, mengingat Projo tak lepas dari relawan yang sebelumnya hadir karena Jokowi. "Kami sudah kirim surat permohonan audiensi kepada Pak Jokowi pada dua hari yang lalu, belum ada jawaban. Pak Jokowi mungkin masih melihat jadwal kapan akan menerima pertemuan dengan Projo Ganjar," pungkasnya.

Sementara itu, organisasi relawan Pro Jokowi (Projo) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) wilayah Jakarta Utara, Selatan, dan Timur mendeklarasikan dukungannya kepada bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo untuk maju dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. "Kami segenap pengurus DPC Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara, beserta relawan Projo dengan kesungguhan hati dan kesukarelaan kami menyatakan mendukung bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden RI dalam Pilpres 2024," kata Ketua DPC Jakarta Selatan Heri Purwanto mewakili dua DPC lainnya dalam deklarasi yang digelar di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo Jakarta,

Minggu (15/10).

Heri menyebut deklarasi tersebut juga untuk memberikan keterangan kepada publik yang menyebut bahwa Projo pendukung Ganjar adalah Projo siluman, pasca Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo yang diketuai Budi Arie Setiadi memutuskan untuk mendukung bakal calon presiden Prabowo Subianto pada deklarasi yang digelar Sabtu (14/10). "Kami menghormati keputusan DPP Projo mendukung Prabowo, tapi kami akan berjuang semaksimal mungkin untuk memenangkan pak Ganjar," jelas Heri.

Heri mengklaim jumlah relawan Projo yang mendukung Ganjar lebih besar dibandingkan dengan Projo ke arah Prabowo, yakni sekitar 70 persen di pihak Ganjar dan 30 persen di arah Prabowo. "Kami bisa mengatakan bahwa Projo lebih banyak yang ke Ganjar, khususnya di Utara ya karena saya tahu persis, yang ke Prabowo juga ada tetapi tidak sebanyak yang ke Pak Ganjar. Perbandingannya antara 70 dan 30 persen," ujarnya. (Ant/Has)-f

# NasDem Sambungan hal 1

Sahroni menilai pernyataan pimpinan KPK Alex Marwata secara terbuka yang mengatakn dana korupsi SYL mengalir sampai ke partai merupakan perkataan yang tendensius. "Kami mempertimbangkan untuk melakukan somasi atas pernyataan tersebut," tambahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK menyebut terdapat aliran dana sejumlah miliaran SYL ke Partai NasDem. "Sejauh ini, ditemukan juga aliran penggunaan yang sebagaimana perintah SYL yang ditunjukkan untuk kepentingan Partai NasDem dengan nilai miliaran rupiah dan KPK akan terus mendalami," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Terpisah, mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) menilai mantan Mentan SYL bisa menjalani seluruh proses hukum dengan baik. "Saya lihat saudara Syahrul ini siap untuk menghadapi seluruh proses hukum, itu baguslah," kata Jusuf Kalla usai menghadiri dialog publik Pemilu untuk Siapa? Rakyat dan Negara di Mana? yang berlangsung di Taman Ismail Marzuki Jakarta, Sabtu (14/10).

JK merasa prihatin atas jempit paksa oleh KPK terhadap SYL. "Ya, tentu saya merasa prihatin," ujarnya.

Penangkapan paksa tersebut juga menarik perhatian mantan penyidik KPK Yudi Purnomo yang memper-

tanyakan mengenai hal mendesak apa yang membuat KPK menangkap SYL, terlebih surat penangkapan ditandatangani langsung oleh Ketua KPK Firlil Bahuri. "Sebenarnya kewenangan penyidik itu bisa menangkap tersangka dalam kondisi apa pun, ya, entah itu surat panggilan sudah dilakukan, bahkan sprindik pun baru dikeluarkan bisalah melakukan penangkapan terhadap tersangka," katanya.

Namun, kata Yudi, penyidik juga harus mematuhi jika ternyata tidak ada hal-hal yang penting atau urgen kenapa harus buru-buru melakukan penangkapan terhadap SYL. Apabila pemanggilan pertama dan pemanggilan kedua sebagai tersangka SYL tidak mengindahkan atau mangkir dari panggilan atau diduga bersembunyi, itu perlu dilakukan penangkapan.

"Akan tetapi, kalau tidak, ya, sebenarnya komunikasi sudah berlangsung dengan baik. Kalau apa yang dilihat di pemberitaan bahwa Jumat, SYL mau datang pemanggilan ditunggu saja. Kalau Jumat enggak datang sesuai dengan janji, ya, bisa ditangkap. Kenapa harus buru-buru?" ujarnya. (Ant/Has)-f

# Air Sambungan hal 1

melalui doktrin pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals. Yang mentargetkan terkikisnya kelaparan dan kemiskinan: zero hunger and zero poverty: sebagai tujuan utama dari 17 tujuan SDGs.

Di Indonesia, puncak peringatan HPS 2023 dipusatkan di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan. Aneka kampanye dan persiapan sudah ditata sangat rapi dan meriah oleh Kementerian Pertanian, dan pemerintah daerah terkait, serta insya Allah dihadiri Presiden dan sejumlah pejabat RI. Dengan kesungguhan prosesi dimaksud, ada baiknya tersosialisasikan juga sejarah HPS kok sampai diperingati ratusan Negara.

Alkisah, dalam mempromosikan kepedulian akan kelaparan dan tindakan demi masa depan pangan, manusia, dan planet bumi, FAO menetapkan tanggal 16 Oktober sebagai Hari

Pangan Sedunia pada 1979. Sejak peringatan pertamanya tahun 1979, selepas dicetuskannya Resolusi Nomor 179 yang disepakati semua negara anggota FAO tentang penetapan dan perayaan World Food Day, aneka tema global dirumuskan untuk meningkatkan kepedulian dunia terhadap masalah kemiskinan dan kelaparan. Sejak itulah, perayaan HPS diperingati oleh negara anggota mulai 1981.

Hari ini lebih 150 negara memperingati HPS 2023. Ajakan lebih intensif lagi menaruh perhatian terhadap perubahan iklim, ulah manusia yang cenderung sembrana, peduli terhadap kelangkaan sumberdaya alam, dan tidak semakin terjebak dalam suasana kesembranaan pemanfaatan air dan sumberdaya sekitar yang semakin akut dan membahayakan kehidupan bagi semuanya.

Pilihan subtema: leave one behind:

jangan ada yang tertinggal, sekaligus memandatkan perlu disadarinya perhatian bersama akan hak azazi atas pangan bagi siapapun di muka bumi. Tidak seorang pun boleh ditinggalkan dalam urusan ini. Konsekuensi dari mengadopsi amanat FAO dalam tema kali ini sungguh sangat revolusioner.

Ada baiknya kita ingat lagi ajaran para rohaniawan, tentang keberadaan sumberdaya bersama ini bagi kehidupan masyarakat luas. Seperti nasehat para rohaniawan yang sangat populer: *i...dan saya jadikan dari air itu segala kehidupan...i*. Kiranya kita sepakat bahwa tema besar HPS 2023 ini membawa serta amanat kerohanian yang menyertai keberadaan agamadan-kepercayaan ketuhanan di muka bumi yang menyeluruh, universal sifatnya. (Penulis adalah Guru Besar Agroindustri UGM, Ketua Dewan Guru Besar UGM)-f



Prakiraan Cuaca		Senin, 16 Oktober 2023			
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Suhu	Kelembaban
Bantul	☁	☁	☁	22-30	65-95
Sleman	☁	☁	☁	22-29	65-95
Wates	☁	☁	☁	22-29	65-95
Wonosari	☁	☁	☁	22-30	65-95
Yogyakarta	☁	☁	☁	22-30	65-95
Cerah	☀	Berawan	Udara Kabur	Hujan Lokal	Hujan Pelir